

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, cet.9, Jakarta : Sinar Grafika.
- Anonim, 2007, *Petunjuk teknis Direktorat Survey dan Potensi Tanah, Deputi Survey, Pengukuran dan Pemetaan BPN RI*, Jakarta'
- AP. Parlindungan, 1986, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Asshiddiqie Jimly, dan Safa"at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- Jimly Asshidique, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK RI.
- Atamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*, Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bachtiar Effendie. 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Cet.2. Bandung : Alumni.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Boedi, Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UU Pokok Agraria*, Jakarta : Djambatan Boedi.
- Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Yogyakarta : Legality.
- Effendi Parangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Farida Maria, 2008 "Laporan Kompedium Bidang Hukum Perundang-undangan" di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan

Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan,
Sistem Hukum Nasional.

Fauzi HM Achmad, 2020, *Implikasi Hukum Syarat Pengangkatan Notaris Pengganti Terhadap Kedudukan Akta Yang Dibuat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

_____, 2005, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Gunanegara, 2008, *Rakyat & Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Pelajaran Filsafat, Teori Ilmu, dan Yurisprudensi, Tatanusa*, Jakarta.

Imam soetikno, 1987, *proses terjadinya UUPA*, Yogyakarta : Gajah Muda University Press.

Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, Arkola.

John Salindeho, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Isra Saldi, 2013, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Mertokusumo Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Jakarta : Kencana.

Redi Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ruslan Acmad, 2011, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.

Samudra Putra Indratanto, dkk, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum 16.

Sitorus, S.R.P. 2004. *Evaluasi Sumberdaya Lahan*, Bandung : Tarsito Bandung.

Soejono, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.

Syamsudin Azis, 2011, *Praktek dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta, Sinar Grafika,

Syamsuddin pasamai, dkk, 2017, *Hukum Agraria dan Hukum tanah Indonesia*, Makassar : Kelompok Pustaka refleksi

Hamni, L. B, 2012, *Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jurnal Hukum Universitas Mataram

Jurnal Kertha Negara Vol 11 No.1 Tahun 2023

E.Fernando M.Manullang, 2017, *Legisme, legalitas dan kepastian hukum*, Prenada Media Grup.

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pf^labat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1339/SK-HK.02/X/2022 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Secara Umum.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak milik atas tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Jurnal

Andi Erwin Hamzah, Andi Suryaman Mustari Pide, Kahar Lahae, *Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama*, Papua Law Jurnal, vol 7 Issue 2, 2023, hlm 55

Fitriah Mar'atun, 2021, *Kedudukan Peraturan Menteri Sebagai Bagian Dari Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU 12/2011*, Vol. 33, No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ode Pota Al Araaf, et.al. 2022, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*, (Widya Pranata Hukum, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, Vol.4, No. 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Shabranah. A.N, et.al, 2023, *Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi*, Unes Law Review, Vol. 5 No. 4, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

Urip Santoso, 2010, *Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Perusahaan Swasta*. jurnal PERSPEKTIF Volume XV No. 3.

_____, 2012, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 1